

BAB I

**TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEBAKARAN HUTAN DI
PROVINSI RIAU BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY DI
HUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

A. Latar Belakang Penelitian

Ditinjau dari perkembangan industri pada saat ini, terutama pada industri modern selalu membawa akibat yang dapat menimbulkan resiko/efek negatif terhadap kualitas kesehatan manusia dan kualitas lingkungan hidup daerah sekitar tempat industri berada. Sejalan dengan adanya peningkatan masyarakat terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta adanya tuntutan dari masyarakat supaya segala kegiatan industri dapat dijalankan secara lebih bertanggungjawab terhadap lingkungan. Tetapi, kadangkala masih ada saja para pengusaha industri yang masih mengabaikan berbagai persyaratan-persyaratan lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan pengoprasian UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Dalam hal pengolahan limbah, apabila limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) tidak dapat dikelola dengan baik dan dibuang saja ke lingkungan masyarakat dalam hal ini ke sungai, maka akan menimbulkan pencemaran. Apabila sudah terjadi pencemaran tersebut di lingkungan, maka disinilah berlaku asas tanggung jawab mutlak yang harus dibebankan kepada para pelaku industri.

Korporasi sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum dibidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Alasan keengganan menjatuhkan pidana kepada korporasi, karna tidak diakui sebagai subjek hukum dan tidak ada unsur *Mens rea*,(kesalahan) pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Hal ini menjadi hambatan untuk menghukum korporasi dengan sanksi yang setimpal mengingat dalam hukum pidana Indonesia terdapat asas yang mewarnai KUHP yaitu *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Dewasa ini, jika diamati bersama, kejahatan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan globalisasi, dimana kejahatan yang terjadi pada masyarakat agraris berbeda dengan kejahatan yang terjadi pada masyarakat industri. Bahkan jika dipandang dari sudut pelakunya, semula pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana hanyalah orang perorangan atau individu, tetapi kini juga korporasi atau badan hukum atau disebut juga *rechts person*, karena ternyata badan hukum atau korporasi juga dapat melakukan kejahatan yang dapat dipidana.

Sehubungan dengan kejahatan korporasi Soedjono Dirdjosisworo, sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, menyatakan bahwa :¹

¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Bandung: Kencana, 2012, hlm. 3

kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijual lewat advertensi secara besar-besaran, dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.

Kejahatan-kejahatan korporasi yang menonjol dewasa ini adalah *price fixing* (memainkan harga barang secara tidak sah), *false advertising* (penipuan iklan), kejahatan di bidang perbankan: *cyber crime*, *money laundering*, *illegal logging*, dan kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*)². Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang menjadi perhatian karena perkembangan yang terus meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup (*environmental crime*). Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak serta korban yang besar dan kompleks yang tidak hanya menguras sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan.

Sebagai contoh, pada tahun 1984, telah terjadi suatu bencana kimia akibat kebocoran gas pada pabrik milik *Unicorn Carbide India Limited*, di Bhopal India. Kejadian tersebut sebagai akibat buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan biaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan efeknya akan dirasakan hingga dua puluh tahun kedepan.

Kasus *the Benguet Mining Company* di Filipina dimana untuk mencari emas, Benguet Mining telah membuat lubang yang dalam di bukit-

² *Ibid*, hlm 5

bukit, mengikis habis pepohonan dan tanah permukaan, dan membuang banyak sekali bongkahan-bongkahan batu ke dalam sungai-sungai setempat. Dengan terkurasnya sumber daya tanah dan air, maka orang Igorot yang merupakan penduduk asli kawasan tersebut merasakan kesulitan dalam menanam padi dan pisang disana dan harus pergi ke bukit yang satu lagi³. Di Indonesia kasus serupa terjadi di Teluk Buyat yang dilakukan oleh Newmont.

Kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur yang diindikasikan sebagai kegiatan pengeboran yang dilakukan tidak memenuhi standarisasi (*human error*) yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Peristiwa Lumpur Lapindo Brantas mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan segala harta bendanya karena terendam lumpur, belum lagi industri-industri yang berada disekitar semburan lumpur yang mengakibatkan tidak bisa melakukan produksi dan ribuan orang kehilangan pekerjaannya⁴.

Kemudian kasus pembakaran hutan oleh PT. Bumi Mekar Hijau, yang menjadi pembicaraan yang hangat di berbagai media sosial dikarenakan hakim menilai kebakaran tak merusak lahan karena masih bisa ditumbuhi tanaman akasia. Majelis hakim menilai, tanaman akasia turut terbakar sehingga perusahaan itu mengalami kerugian. Namun terlepas dari itu, peristiwa ini berdampak pada kerugian yang diderita masyarakat dan negara. Padahal masyarakat mengalami dampak langsung, seperti tidak bisa sekolah karena sekolah diliburkan, gangguan penerbangan karena asap dan juga anggaran

³ *Ibid*, hlm 9

⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Medan: PT Softmedia, 2010, hlm. 1

mitigasi bencana yang harus dikeluarkan Negara.⁵ Cara pandang pengadil dinilai aneh dan tak memiliki rasa keadilan, bahkan tidak menunjukkan *sense of crisis* pada dampak kebakaran hutan dan lahan bagi jutaan warga setempat. Bahkan, pengulangan kejadian kebakaran dari tahun ke tahun di lahan konsesi PT BMH tak dilihat hakim.

Pada tahap awal proses industrialisasi, pada saat gumpalan asap mulai mengotori udara, limbah mengotori air (sungai maupun laut) dan sampah-sampah yang dibuang ke tanah yang subur, orang masih percaya pada kemampuan udara untuk membersihkan sendiri, air (sungai/laut) dapat mengencerkan benda-benda asing secara alami tanpa perlu khawatir akan bahayanya.⁶

Tetapi sekarang masalah yang ada dan terjadi begitu kompleks dalam tatanan sistem lingkungan, yang ada hanya kepentingan pemanfaatan sumber alam semata tanpa memperhatikan dampak yang akan timbul dari kegiatan-kegiatan usaha yang ada. Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia berbeda dengan masalah lingkungan di negara-negara maju atau negara industri. Masalah-masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat dari efek samping penggunaan bahan energi teknologi maju yang boros energi pada kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, sedangkan masalah lingkungan di Indonesia sering berpangkal pada

⁵<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/08/12244191/Hakim.PN.Palembang.Pemutus.Kasus.Kebakaran.Hutan.Dilaporkan.ke.KY>, diakses pada tanggal 11-01-2016

⁶ M. Daud Silalahi, *Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Alumni, 2001, hlm. 6-7.

keterbelakangan pembangunan sebagai penyebab timbulnya masalah lingkungan yang ada.

Secara konsep kebijakan pembangunan sudah memasukkan faktor kelestarian lingkungan sebagai hal yang mutlak untuk dipertimbangkan, namun dalam implementasinya terjadi kekeliruan orientasi kebijakan yang tercermin melalui berbagai peraturan yang terkait dengan sumber daya alam. Peraturan yang dibuat cenderung mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa perlindungan yang memadai, sehingga membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi pemilik modal⁷.

Pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan kualitas lingkungan, bahkan pada gilirannya dapat mengakibatkan rusaknya komunitas biotik maupun abiotik. Manusia sebagai salah satu komponen biotik juga dapat terkena dampak pencemaran lingkungan tersebut baik langsung maupun tidak langsung.

Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, sudah tentu akan mengurangi daya dukung lingkungan. Berkurangnya daya dukung lingkungan mengakibatkan berkurangnya kemanfaatan lingkungan bagi manusia. Bahkan tidak jarang pencemaran lingkungan tidak hanya mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan tetapi dapat menimbulkan penyakit tertentu pada manusia karena manusia mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari lingkungan yang sudah tercemar. Bahkan timbul penyakit sebagai akibat dari menghirup udara

⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat dalam Buku Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2005, Hal XVI.

yang sudah tercemar, atau meminum air yang sudah tercemar dan sebagainya. Dengan demikian pencemaran lingkungan juga berdampak pada kesehatan manusia.

Pencemaran lingkungan selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunkan daya dukung lingkungan, mengancam kesehatan manusia, juga mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Pada hal kelangsungan kehidupan manusia sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia baik biotik maupun abiotik. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran bagaimana mengelola sumber daya yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan, dikenal konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Memang konsep pembangunan berkelanjutan, telah diletakkan sebagai kebijakan, namun demikian dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam.

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka pendayagunaan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Pembangunan berwawasan lingkungan yang kemudian dipopulerkan dengan pembangunan berkelanjutan oleh *World Commision on Environment*

and Development didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang.

Potensi persoalan lingkungan yang dapat berpengaruh besar terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia menimbulkan kesadaran perlunya pengaturan masalah lingkungan dengan perangkat hukum. Pengaturan masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang terbaru adalah Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada *biotic community* maupun *abiotic community* agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan.

Karena kegiatan yang berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan pada hakekatnya bukan semata-mata merupakan kegiatan manusia, tetapi kegiatan korporasi (*corporate*), maka sudah tentu perlindungan kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana

lingkungan tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum manusia tetapi juga memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum korporasi atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, diantaranya doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau teori identifikasi (*identification theory*) atau disebut juga teori atau doktrin "alter ego" atau "teori organ". Perbuatan atau kesalahan "pejabat senior" (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Bertolak dari doktrin "*respondeat superior*". Didasarkan pada *employment principle* bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh atau karyawan dan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban atau kondisi atau situasi tertentu yang ditentukan Undang-undang. Pelanggaran terhadap kewajiban korporasi dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau *strict liability*, apalagi kalau korporasi tersebut menjalankan usahanya tanpa izin, atau korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin itu⁸.

Strict Liability, merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang, tanpa melihai lebih jauh sikap batin si pembuat.⁹

Suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi adalah cetisan aspirasi atau motivasi tertentu dan korporasi (bukan cetusan rasa atau pikiran orang manusia insani). Dihadapkan dengan kondisi sosial tersebut disamping mewarnai gejala sosial

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

⁹ Buchhari Said, H, S.H., M.H, Averroes, S.H. *Tindak Pidana Korporasi*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2013, hlm 61-62

umum yang rutin dan wajar diantaranya juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan korporasi.¹⁰

Dalam Pasal 1 butir 32 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, dirumuskan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Artinya apabila terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap undang undang ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana¹¹. Sedangkan doktrin *Strict liability* sudah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, konsep ini diatur pula dalam Pasal 88 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dengan demikian berarti terdapat keinginan dari pembuat undang-undang untuk menerapkan asas *strict liability* secara umum dalam hukum pidana Indonesia baik untuk menjatuhkan pidana kepada manusia maupun korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul. “TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI

¹⁰ *Ibid*, hlm 65

¹¹ Rudi Pradisetia Sudirdja, *Penerapan Corporate Criminal Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Makalah, Magister Hukum UI, 2013, hlm. 3

RIAU BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimanakah penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi pemerintah dalam hal penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang No.

32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dapat ditemukan solusi-solusi baru dalam menerapkan asas *strict liability* tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana dan khususnya masalah asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.
 - b. Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat Undang-undang dalam menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut mengenai asas *strict liability* dan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi Mahasiswa maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai asas pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana khususnya mengenai asas *strict liability* berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a. Untuk pengguna praktis adalah sebagai masukan (input) bagi pihak pemerintah Negara Indonesia agar hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum.
- b. Untuk pihak Pemerintah Indonesia agar lebih berhati-hati serta cermat dalam menyikapi undang-undang yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan sesuatu masalah dikemudian hari terutama dibidang hukum tentang tindak pidana korporasi
- c. Bagi penulis adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Penegakan Hukum Pidana di Universitas Pasundan Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Rumusan itu menunjukkan bahwa pembebasan hanya mungkin dicapai melalui pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Undang-Undang Dasar telah memberikan jaminan pelaksanaan penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari “*wordt gestraft*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Menurut Moeljatno, kalau kata “*straf*” diartikan sebagai “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman¹².

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak saja hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya¹³.

Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, pidana merupakan istilah khusus sehingga perlu adanya pembatasan pengertian dari pidana¹⁴. Roeslan Saleh memberi pengertian pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 185

¹³ *ibid*

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 109-110

yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Dalam kamus

Black's Law Dictionary dinyatakan bahwa punishment adalah:¹⁵

Any fine, or penalty or confinement upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law. (setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum atau vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).

Berdasarkan pengertian pidana yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pidana memuat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum;
4. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang per orang/individu) yang dapat menjadi subjek tindak pidana atau dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini dapat kita lihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 186

¹⁶ *ibid*

bagaimana delik dirumuskan (yang selalu dimulai dengan frasa *hij die* “barangsiapa”)¹⁷.

Dalam perkembangannya terdapat perubahan-perubahan. Sistem pertanggungjawaban pidana dari masa ke masa mengalami perkembangan. Dewasa ini pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan terhadap individu namun juga kepada korporasi. Korporasi memiliki kedudukan sebagai subjek tindak pidana, sehingga perbuatan korporasi yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Suatu korporasi dianggap sebagai *person* karena terdapat aturan hukum yang menentukan hak dan kewajiban hukum tertentu terkait dengan kepentingan anggota korporasi tetapi tidak terlihat sebagai hak dan kewajiban anggotanya, dan karenanya ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban korporasi itu sendiri. Hak dan kewajiban tersebut sebagian dibuat oleh organ korporasi. Jika organ korporasi melakukan delik, maka sanksi dikenakan kepada korporasi, bukan kepada anggotanya sebagai individu. Maka alasan utama mengapa korporasi diakui sebagai *legal person* adalah karena fakta bahwa pertanggungjawaban delik perdata yang dilakukan oleh korporasi pada prinsipnya terbatas pada kekayaan korporasi itu sendiri¹⁸.

Sebuah korporasi menurut hukum perdata adalah suatu *legal person* (atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda), yang memiliki harta kekayaan sendiri, memiliki hak dan kewajiban, yaitu serupa halnya dengan manusia,

¹⁷Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 97

¹⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russel & Russel, 1961), hlm. 96, dikutip dari buku Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, KonstitusiPers, Jakarta, 2012, hlm. 77

sehingga oleh karena itu pula korporasi dapat menggugat dan digugat di pengadilan perdata atas namanya sendiri. Korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menurut beberapa pendapat ahli hukum bahwa korporasi bukanlah suatu fiksi. Korporasi merupakan hal yang benar benar eksis dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama dihadapan hukum (*principle of equality before the law*). Korporasi-korporasi tersebut, dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana¹⁹.

Menurut Sahetapy, perumusan tindak pidana korporasi (*corporate crime*) sampai saat ini masih merupakan suatu dilema, sama dilemanya dengan konsep *white collar crime* yang diperkenalkan pertama kali oleh Sutherland yang memunculkan setumpuk istilah dengan makna dalam konteks yang berbeda namun dalam ruang lingkup yang sama pula²⁰.

Dalam Black's Law Dic, *corporate crime* di definisikan sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh dan dituntukan kepada suatu korporasi sebagai akibat dari aktivitas dari pejabat atau karyawannya (misal : penetapan harga, pembuangan limbah beracun²¹.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, hal 25.

²¹ Henry Campbel Black, *op cit*, hal 339.

Pengertian lain mengenai kejahatan korporasi adalah suatu bentuk kejahatan (*crime*) dalam bentuk *white collar crime*, yang merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis, melalui pengurus atau yang otorisasi olehnya, dimana meskipun perusahaan an sich tidak pernah mempunyai niat jahat (*mens rea*).

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli Hukum Pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pengenaan sanksi pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak²².

Konsep *strict liability* merupakan konsep yang ada dalam sistem hukum *Common Law*. Pada mulanya, sistem pertanggungjawaban tersebut diterapkandalam kasus-kasus perdata. Namun dalam perkembangannya, konsep *strict liability* juga diterapkan pada kasus-kasus pidana tertentu yang

²² H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia, 2003, hlm. 2

dianggap membahayakan sosial, seperti narkoba, pelanggaran lalu lintas, makanan dan lain-lain²³.

Korporasi dalam ruang geraknya dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, sehingga tujuan memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.

Korporasi dapat melakukan tindak pidana melalui pejabat seniornya yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk berperan sebagai otak dari korporasi. Pejabat senior tersebut adalah mereka yang mengendalikan korporasi, baik sendirian maupun bersama-sama dengan pejabat senior yang lain, yang mencerminkan dan mewakili pikiran atau kehendak dari korporasi. Para pengendali korporasi dalam pengertian luas terdiri dari para direktur dan manajer. Sedangkan, para pegawai biasa dan agen yang hanya melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh pejabat senior.

Tindak pidana yang dilakukan korporasi seringkali tidak tampak (kelihatan) karena kompleksitas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang, serta pelaksanaannya yang rapi dan terkoordinasi serta memiliki dimensi ekonomi. Selanjutnya, tidak tampaknya tindak pidana yang dilakukan korporasi oleh karena dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bahkan dalam penegakan hukumnya lemah, karena ketentuan hukum positif

²³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana. 2006, hlm. 68

yang mengaturnya masih dapat ditafsirkan ganda serta sikap tidak acuh masyarakat atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi (badan usaha), setidaknya-didalamnya terdapat:²⁴

1. Tindakan illegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosial ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas Hukum Perdata dan Hukum Administrasi;
2. Baik korporasi (sebagai “subjek hukum perseorangan atau *legal person*”) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as a illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan;
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan

²⁴ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 58

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Lingkungan hidup dengan sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat untuk generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan melayani kepentingan-kepentingan individu.

Kebakaran hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama satu dekade ini tidak semata-mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis. Namun dipengaruhi oleh unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam pembukaan lahan. Termasuk juga kelalaian pelaku usaha industri, serta proses pengeluaran izin penguasaan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini menunjukkan pengawasan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau masih sangat lemah. Peristiwa pembakaran hutan oleh 7 tersangka korporasi yang berakibat negatif kepada

masyarakat dengan skala yang sangat luas²⁵, Korporasi seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana. Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*).

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana disamping manusia. Manakala korporasi juga diakui sebagai subjek hukum disamping manusia, maka konsep pertanggungjawaban pidana harus diciptakan agar korporasi juga dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana. Secara teoritis, terdapat tiga teori atau sistem pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum korporasi, yaitu teori identifikasi, *strict liability* dan *vicarious liability*. Ketiga teori atau sistem pertanggungjawaban ini, pada hakikatnya merupakan respon terhadap eksistensi korporasi yang dewasa ini diakui sebagai subjek hukum pidana²⁶.

²⁵http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150916_indonesia_tersang_ka_asap, diakses pada tanggal 23 November 2015

²⁶ *Ibid*, hlm 160

Asas *strict liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban yang ketat, artinya seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan)²⁷.

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengadopsi pertanggungjawaban korporasi juga doktrin *strict liability*. Dalam pasal 1 ayat 32 disebutkan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Subjek dari tindak pidana lingkungan hidup adalah orang dan badan hukum (korporasi), oleh karenanya korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sedangkan doktrin *strict liability* diatur dalam pasal 88 yang merumuskan

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah :²⁸

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan

²⁷ *Ibid*, 163

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm. 3

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menurut pendapat Martin Steinmann dan Gerald Willen:²⁹

“Deskriptif Analitis” ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”

Dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan data-data yang relevan. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder³⁰. Metode penelitian hukum normatif pada penulisan skripsi ini yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.

²⁹ Martin Steinmann Dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, Hal. 97.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 118-119

Penelitian asas-asas hukum menurut Scholten, sebagaimana yang dikutip oleh Amiruddin dan H. Zainal Asikin, merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, artinya memberikan penilaian yang bersifat etis. Asas-asas hukum tersebut ditarik darimana asalnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya³¹.

3. Tahap Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah penerapan asas *strict liability* dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap korporasi yaitu:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan- bahan hukum primer, bahan- bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikat, antara lain :

- a) UUD 1945 setelah diamandemen;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

³¹ *Ibid*, hlm 123

- c) Undang-undang No. 32 Tahun 2009.
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain :
 - a) Rancangan peraturan - peraturan perundang - undangan;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - c) Hasil - hasil penelitian.
- 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :
 - a) Seperti bibliografi;
 - b) Indeks kumulatif.
- 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.

Menurut Koentjoroningrat mengatakan :³²

“Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian umumnya untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian, menyusun persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah”.

³² Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 65.

Data primer, dan data sekunder yang di peroleh dari kepustakaan. Namun demikian penelitian ini mengutamakan dan menitikberatkan pada data sekunder, mengingat penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, sedangkan primer hanya bersifat penunjang. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sumber data primer dan sekunder, yang diteliti meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan, alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah alat tulis , yaitu untuk mencatat bahan- bahan yang diperoleh dari buku, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh. Sedangkan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan Alat tulis. Jelasnya adalah data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan sebagai sumber data.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data sekunder tersebut dianalisis dengan yuridis normative dan disajikan secara *kualitatif* kemudian dianalisa secara deskriptif-analitis, yaitu menelaah data sekunder diolah, dianalisis dan dikonstruksikan, serta disajikan secara *kualitatif*.³³ Artinya, permasalahan

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , op. cit, hlm. 69.

yang ada yakni permasalahan tindak pidana korporasi dalam kebakaran hutan di provinsi riau berdasarkan asas strict liability di hubungkan dengan Undang undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Perpustakaan (*Library Research*)

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.
3. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jln. Cimbeuleuit No. 94 Bandung.
4. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jln. Tamn Sari No. 8 Bandung.

b. Lapangan

1. Warung Internet
 2. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Bandung
 3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung
-

8. Rencana Penulisan

NO.	Tahapan Penelitian	Waktu					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Persiapan judul dan Acc judul penyusunan penulisan hukum						
2.	Persiapan studi kepuustakaan						
3.	Bimbingan usulan penelitian, revisi dan Acc untuk seminar						
4.	Seminar usulan penelitian						
5.	Pelaksanaan penelitian						
7.	Sidang komprehensif						

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahan secara tersendiri, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan ke dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah penguraian masalah agar dapat lebih dimengerti, sehingga akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan yang benar.

Adapun susunan ini skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari beberapa sub bab, yakni: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Menguraikan tentang, Pengertian Korporasi, Penempatan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana, Bentuk - Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan inventarisasi Peraturan Perundang - undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana.

BAB III : TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEBAKARAN HUTAN OLEH PT. HSL, MWR, RAPP YANG DIDUGA TERLIBAT PEMBAKARAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

Menguraikan Tentang Perkembangan Asas *Strict Liability*, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penerapan Asas *Strict Liability* dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup terhadap 17 perusahaan yang

diduga terlibat dalam kasus pembakaran lahan di Provinsi Riau.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PPLH

Menguraikan mengenai analisis-analisis penulis terhadap identifikasi masalah yang terdiri dari sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, Penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kendala yang dihadapi pemerintah dalam hal penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir membuat kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap identifikasi masalah dan diakhiri dengan saran.

DAFTAR PUSTAKA